

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan, Johannes dan Bernadette M. Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta.
- Hajati, Sri, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, dan Oemar Moechthar, 2018, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Meliala, A Qirom Syamsudin, 2004, *Pokok - Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja Gunawan, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2009, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Setiawan, R., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remi, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Artikel Jurnal

Dona Budi Kharisma, "Buy Back Guarantee dan Perkembangan Hukum Jaminan Kontemporer di Indonesia", *Privat Law*, Vol. III, No. 2, Juli-Desember 2015.

Hendy Eka Ardiansyah dan Dian Rahmawati, "Efektivitas Penyediaan Perumahan oleh Perumnas dalam Menangani Masalah Housing Backlog di Kabupaten Gresik", *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 10, No. 1, Agustus 2021.

Made Ara Denara dan I Made Dedi Priyanto, "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2020.

Ronald C. E. Kalesaran, R. J. M. Mandagi, dan Estrelita Waney, "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Pemilihan Lokasi Perumahan di Kota Manado", *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. 3, No.3, September 2013.

Hasil Penelitian

Adit Rangga Saputra, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Perumahan Pesona Elo Residence*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Alfiansyah, I Nyoman Nurjaya, Sihabudin, 2015, *Urgency Hinding Sale Agreement Deed Of Land That Made By Notary*, Hasil Penelitian, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Andamawisari, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah di Perumahan Tiara Mas Yogyakarta*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Diah Ayu Intani, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan antara Pembeli dengan Developer ketika Terjadi Wanprestasi di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Riski Abdriana Yuriani, 2013, *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Internet

ADCO Law, “Apa Itu Litigasi dan Keuntungannya”, <https://adcolaw.com/id/blog/apa-itu-litigasi-dan-keuntungannya/>, diakses 10 Desember 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bangsa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, diakses 10 November 2022.

Badan Pusat Statistik, “Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2020-2022”, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html>, diakses 20 September 2022.

Bank Indonesia, “Perkembangan Properti Komersial Triwulan II 2022”, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/PPKom_Triwulan_II_2022.pdf, diakses 1 Desember 2022.

Bisnis.com, “Kabupaten Gresik Paling Prospektif untuk Properti di Jawa Timur”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210930/47/1448792/kabupaten-gresik-paling-prospektif-untuk-properti-di-jawa-timur>, diakses 22 Desember 2022.

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia, “Sejarah dan Pembentukan”, <http://www.rei.or.id/sejarah.php>, diakses 6 Januari 2023.

HUKUMPROPERTI.com, “Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, Berdasarkan Kepmenpera Nomor 09/KPTS/M/1995 Tahun 1995”, <https://hukumproperti.com/pedoman-pengikatan-jual-beli-rumah->

berdasarkan-kepmenpera-nomor-09kptsm1995-tahun-1995/, diakses 1 Oktober 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Darurat Kebutuhan Papan di Era Milenial”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/15037/Darurat-Kebutuhan-Papan-di-Era-Milenial.html>, diakses 20 Desember 2022.

Legalitas.org, “IMB (Izin Mendirikan Bangunan)”, <https://legalitas.org/pengurusan-imb-izin-mendirikan-bangunan>, diakses 10 Januari 2023.

Rumah.com, “Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling, Ini Prosedurnya Sesuai Hukum”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/pemecahan-sertifikat-tanah-kavling-76486>, diakses 10 Januari 2023.

Rumah.com, “Syarat Pecah IMB Induk dan Cara Mengurusnya, Simak Penjelasannya di Sini!”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/syarat-pecah-imb-induk-71284>, diakses 10 Januari 2023.

Sikapi Uangmu, “Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10422>, diakses 20 Januari 2023.

Tempo.co, “Alasan Masyarakat Lebih Pilih Hunian Siap Huni di Masa New Normal”, <https://bisnis.tempo.co/read/1358947/alasan-masyarakat-lebih-pilih-hunian-siap-huni-di-masa-new-normal>, diakses 1 Desember 2022.

Yessi Nadia, “Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses 5 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.